



# **BUPATI BENGKAYANG**

## **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 4 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 / PMK.2 / 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2010.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi belanja pegawai yang diperlukan guna menjalankan suatu kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010.

**BAB II**  
**STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI**  
Pasal 2

Standar biaya umum belanja pegawai digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010, sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 3

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum Belanja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 22 Januari 2010

**BUPATI BENGKAYANG,**

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 29 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**TTD**

**Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip.19560820 198503 1 010

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010**  
**NOMOR 4**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 4 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 22 JANUARI 2010

STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<b>PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
1.1.	KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN	Orang/Bulan	2,000,000	
1.2.	BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	1,500,000	
1.3.	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	1,000,000	
1.4.	PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	750,000	
1.5.	<b>PENGGUNA ANGGARAN</b>			
a	NILAI PAGU S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	380,000	
b	NILAI PAGU 100 JUTA S/D 250 JUTA	Orang/Bulan	435,000	
c	NILAI PAGU 250 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	490,000	
d	NILAI PAGU 500 JUTA S/D 1 MILYAR	Orang/Bulan	545,000	
e	NILAI PAGU 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR	Orang/Bulan	600,000	
f	NILAI PAGU 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR	Orang/Bulan	655,000	
g	NILAI PAGU 5 MILYAR S/D 10 MILYAR	Orang/Bulan	765,000	
h	NILAI PAGU 10 MILYAR S/D 50 MILYAR	Orang/Bulan	930,000	
i	NILAI PAGU 50 MILYAR S/D 100 MILYAR	Orang/Bulan	1,150,000	
j	NILAI PAGU 100 MILYAR KEATAS	Orang/Bulan	1,370,000	
1.6.	<b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>			
a	NILAI PAGU S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	330,000	
b	NILAI PAGU 100 JUTA S/D 250 JUTA	Orang/Bulan	385,000	
c	NILAI PAGU 250 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	440,000	
d	NILAI PAGU 500 JUTA S/D 1 MILYAR	Orang/Bulan	495,000	
e	NILAI PAGU 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR	Orang/Bulan	550,000	
f	NILAI PAGU 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR	Orang/Bulan	605,000	
g	NILAI PAGU 5 MILYAR S/D 10 MILYAR	Orang/Bulan	715,000	
h	NILAI PAGU 10 MILYAR S/D 50 MILYAR	Orang/Bulan	880,000	
i	NILAI PAGU 50 MILYAR S/D 100 MILYAR	Orang/Bulan	1,100,000	
j	NILAI PAGU 100 MILYAR KEATAS	Orang/Bulan	1,320,000	
1.7.	<b>PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)</b>			
a	NILAI PAGU S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	280,000	
b	NILAI PAGU 100 JUTA S/D 250 JUTA	Orang/Bulan	330,000	
c	NILAI PAGU 250 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	385,000	
d	NILAI PAGU 500 JUTA S/D 1 MILYAR	Orang/Bulan	440,000	
e	NILAI PAGU 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR	Orang/Bulan	495,000	
f	NILAI PAGU 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR	Orang/Bulan	550,000	
g	NILAI PAGU 5 MILYAR S/D 10 MILYAR	Orang/Bulan	660,000	
h	NILAI PAGU 10 MILYAR S/D 50 MILYAR	Orang/Bulan	770,000	
i	NILAI PAGU 50 MILYAR S/D 100 MILYAR	Orang/Bulan	935,000	
j	NILAI PAGU 100 MILYAR KEATAS	Orang/Bulan	1,155,000	
1.8.	<b>PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)</b>			
a	NILAI PAGU S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	100,000	
b	NILAI PAGU 100 JUTA S/D 250 JUTA	Orang/Bulan	120,000	
c	NILAI PAGU 250 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	130,000	
d	NILAI PAGU 500 JUTA S/D 1 MILYAR	Orang/Bulan	150,000	
e	NILAI PAGU 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR	Orang/Bulan	200,000	
f	NILAI PAGU 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR	Orang/Bulan	250,000	
g	NILAI PAGU 5 MILYAR S/D 10 MILYAR	Orang/Bulan	300,000	
h	NILAI PAGU 10 MILYAR S/D 50 MILYAR	Orang/Bulan	350,000	
i	NILAI PAGU 50 MILYAR S/D 100 MILYAR	Orang/Bulan	400,000	
j	NILAI PAGU 100 MILYAR KEATAS	Orang/Bulan	500,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.9.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
	a NILAI PAGU S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	250,000	
	b NILAI PAGU 100 JUTA S/D 250 JUTA	Orang/Bulan	305,000	
	c NILAI PAGU 250 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	330,000	
	d NILAI PAGU 500 JUTA S/D 1 MILYAR	Orang/Bulan	385,000	
	e NILAI PAGU 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR	Orang/Bulan	440,000	
	f NILAI PAGU 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR	Orang/Bulan	470,000	
	g NILAI PAGU 5 MILYAR S/D 10 MILYAR	Orang/Bulan	550,000	
	h NILAI PAGU 10 MILYAR S/D 50 MILYAR	Orang/Bulan	770,000	
	i NILAI PAGU 50 MILYAR S/D 100 MILYAR	Orang/Bulan	825,000	
	j NILAI PAGU 100 MILYAR KEATAS	Orang/Bulan	990,000	
1.10.	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
	a NILAI PAGU S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	100,000	
	b NILAI PAGU 100 JUTA S/D 250 JUTA	Orang/Bulan	120,000	
	c NILAI PAGU 250 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	130,000	
	d NILAI PAGU 500 JUTA S/D 1 MILYAR	Orang/Bulan	150,000	
	e NILAI PAGU 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR	Orang/Bulan	200,000	
	f NILAI PAGU 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR	Orang/Bulan	250,000	
	g NILAI PAGU 5 MILYAR S/D 10 MILYAR	Orang/Bulan	300,000	
	h NILAI PAGU 10 MILYAR S/D 50 MILYAR	Orang/Bulan	350,000	
	i NILAI PAGU 50 MILYAR S/D 100 MILYAR	Orang/Bulan	400,000	
	j NILAI PAGU 100 MILYAR KEATAS	Orang/Bulan	500,000	
1.11.	BENDAHARA PENGELUARAN			
	a NILAI PAGU S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	230,000	
	b NILAI PAGU 100 JUTA S/D 250 JUTA	Orang/Bulan	275,000	
	c NILAI PAGU 250 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	310,000	
	d NILAI PAGU 500 JUTA S/D 1 MILYAR	Orang/Bulan	350,000	
	e NILAI PAGU 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR	Orang/Bulan	385,000	
	f NILAI PAGU 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR	Orang/Bulan	440,000	
	g NILAI PAGU 5 MILYAR S/D 10 MILYAR	Orang/Bulan	525,000	
	h NILAI PAGU 10 MILYAR S/D 50 MILYAR	Orang/Bulan	660,000	
	i NILAI PAGU 50 MILYAR S/D 100 MILYAR	Orang/Bulan	770,000	
	j NILAI PAGU 100 MILYAR KEATAS	Orang/Bulan	935,000	
1.12.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN			
	a NILAI PAGU S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	150,000	
	b NILAI PAGU 100 JUTA S/D 250 JUTA	Orang/Bulan	195,000	
	c NILAI PAGU 250 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	230,000	
	d NILAI PAGU 500 JUTA S/D 1 MILYAR	Orang/Bulan	270,000	
	e NILAI PAGU 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR	Orang/Bulan	305,000	
	f NILAI PAGU 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR	Orang/Bulan	360,000	
	g NILAI PAGU 5 MILYAR S/D 10 MILYAR	Orang/Bulan	445,000	
	h NILAI PAGU 10 MILYAR S/D 50 MILYAR	Orang/Bulan	580,000	
	i NILAI PAGU 50 MILYAR S/D 100 MILYAR	Orang/Bulan	690,000	
	j NILAI PAGU 100 MILYAR KEATAS	Orang/Bulan	855,000	
1.13.	BENDAHARA PENERIMAAN			
	a. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN S/D 5 JUTA	Orang/Bulan	100,000	
	b. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 5 JUTA S/D 10 JUTA	Orang/Bulan	120,000	
	c. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 10 JUTA S/D 30 JUTA	Orang/Bulan	130,000	
	d. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 30 JUTA S/D 50 JUTA	Orang/Bulan	150,000	
	e. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 50 JUTA S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	175,000	
	f. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 100 JUTA S/D 200 JUTA	Orang/Bulan	200,000	
	b. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 200 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	250,000	
	c. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN DIATAS 500 JUTA	Orang/Bulan	300,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.14.	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN			
	a. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN S/D 5 JUTA	Orang/Bulan	85,000	
	b. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 5 JUTA S/D 10 JUTA	Orang/Bulan	100,000	
	c. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 10 JUTA S/D 30 JUTA	Orang/Bulan	120,000	
	d. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 30 JUTA S/D 50 JUTA	Orang/Bulan	130,000	
	e. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 50 JUTA S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	150,000	
	f. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 100 JUTA S/D 200 JUTA	Orang/Bulan	200,000	
	b. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN 200 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	250,000	
	c. NILAI PENERIMAAN PER TAHUN DIATAS 500 JUTA	Orang/Bulan	300,000	
1.15.	PENGURUS BARANG			
	a NILAI PAGU S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	220,000	
	b NILAI PAGU 100 JUTA S/D 250 JUTA	Orang/Bulan	265,000	
	c NILAI PAGU 250 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	300,000	
	d NILAI PAGU 500 JUTA S/D 1 MILYAR	Orang/Bulan	340,000	
	e NILAI PAGU 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR	Orang/Bulan	375,000	
	f NILAI PAGU 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR	Orang/Bulan	430,000	
	g NILAI PAGU 5 MILYAR S/D 10 MILYAR	Orang/Bulan	515,000	
	h NILAI PAGU 10 MILYAR S/D 50 MILYAR	Orang/Bulan	650,000	
	i NILAI PAGU 50 MILYAR S/D 100 MILYAR	Orang/Bulan	760,000	
	j NILAI PAGU 100 MILYAR KEATAS	Orang/Bulan	925,000	
1.16.	PENYIMPAN BARANG			
	a NILAI PAGU S/D 100 JUTA	Orang/Bulan	140,000	
	b NILAI PAGU 100 JUTA S/D 250 JUTA	Orang/Bulan	185,000	
	c NILAI PAGU 250 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Bulan	220,000	
	d NILAI PAGU 500 JUTA S/D 1 MILYAR	Orang/Bulan	260,000	
	e NILAI PAGU 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR	Orang/Bulan	300,000	
	f NILAI PAGU 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR	Orang/Bulan	350,000	
	g NILAI PAGU 5 MILYAR S/D 10 MILYAR	Orang/Bulan	435,000	
	h NILAI PAGU 10 MILYAR S/D 50 MILYAR	Orang/Bulan	570,000	
	i NILAI PAGU 50 MILYAR S/D 100 MILYAR	Orang/Bulan	680,000	
	j NILAI PAGU 100 MILYAR KEATAS	Orang/Bulan	845,000	
2	PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
2.1.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
	a. NILAI PAGU PENGGADAAN S/D 50 JUTA	Orang/Paket	380,000	
	b. NILAI PAGU PENGGADAAN 50 JUTA S/D 100 JUTA	Orang/Paket	430,000	
	c. NILAI PAGU PENGGADAAN 100 JUTA S/D 250 JUTA	Orang/Paket	480,000	
	d. NILAI PAGU PENGGADAAN 250 JUTA S/D 500 JUTA	Orang/Paket	530,000	
	e. NILAI PAGU PENGGADAAN 500 JUTA S/D 1 MILYAR	Orang/Paket	580,000	
	f. NILAI PAGU PENGGADAAN 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR	Orang/Paket	630,000	
	g. NILAI PAGU PENGGADAAN 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR	Orang/Paket	680,000	
	h. NILAI PAGU PENGGADAAN 5 MILYAR S/D 10 MILYAR	Orang/Paket	730,000	
	i. NILAI PAGU PENGGADAAN 10 MILYAR S/D 50 MILYAR	Orang/Paket	780,000	
	j. NILAI PAGU PENGGADAAN 50 MILYAR S/D 100 MILYAR	Orang/Paket	830,000	
	k. NILAI PAGU PENGGADAAN DIATAS 100 MILYAR	Orang/Paket	880,000	
2.2.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGGADAAN S/D 50 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	100,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	95,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	85,000	
2.3.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGGADAAN 50 JUTA S/D 100 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	140,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	100,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	90,000	
2.4.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGGADAAN 100 S/D 250 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	200,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	150,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	145,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.5.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 250 JUTA S/D 500 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	250,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	180,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	150,000	
2.6.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 500 JUTA S/D 1 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	300,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	200,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	160,000	
2.7.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 1 MILYAR S/D 2.5 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	350,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	215,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	180,000	
2.8.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 2.5 MILYAR S/D 5 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	400,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	220,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	205,000	
2.9.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 5 MILYAR S/D 10 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	430,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	250,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	230,000	
2.10.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 10 MILYAR S/D 50 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	500,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	300,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	275,000	
2.11.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 50 MILYAR S/D 100 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	550,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	400,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	370,000	
2.12.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS 100 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	620,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	530,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	500,000	
2.13.	PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN S/D 10 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	60,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	50,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	40,000	
2.14.	PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 10 JUTA S/D 50 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	95,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	55,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	50,000	
2.15.	PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 50 JUTA S/D 100 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	100,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	80,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	70,000	



NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.16.	PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 100 JUTA S/D 250 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	120,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	100,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	90,000	
2.17.	PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 250 JUTA S/D 500 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	200,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	120,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	110,000	
2.18.	PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 500 JUTA S/D 1 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	220,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	150,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	125,000	
2.19.	PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS 1 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	230,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	170,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	150,000	
2.20.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN S/D 10 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	60,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	50,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	40,000	
2.21.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 10 JUTA S/D 50 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	95,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	55,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	50,000	
2.22.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 50 JUTA S/D 100 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	100,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	80,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	70,000	
2.23.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 100 JUTA S/D 250 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	120,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	100,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	90,000	
2.24.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 250 JUTA S/D 500 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	200,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	120,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	110,000	
2.25.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN 500 JUTA S/D 1 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	220,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	150,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	125,000	
2.26.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA NON KONSTRUKSI DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS 1 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	230,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	170,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	150,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG</b>			
3.1.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN PENGADAAN BARANG S/D 10 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	50,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	40,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	30,000	
3.2.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN PENGADAAN BARANG 10 JUTA S/D 50 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	85,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	45,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	40,000	
3.3.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN PENGADAAN BARANG 50 JUTA S/D 100 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	95,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	75,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	60,000	
3.4.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN PENGADAAN BARANG 100 JUTA S/D 250 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	100,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	90,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	80,000	
3.5.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN PENGADAAN BARANG 250 JUTA S/D 500 JUTA			
	a. Ketua	Orang/Paket	175,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	110,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	100,000	
3.6.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN PENGADAAN BARANG 500 JUTA S/D 1 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	200,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	140,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	120,000	
3.7.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN PENGADAAN BARANG DIATAS 1 MILYAR			
	a. Ketua	Orang/Paket	220,000	
	b. Sekretaris	Orang/Paket	160,000	
	c. Anggota	Orang/Paket	140,000	
<b>4</b>	<b>TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>			
4.1.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	800,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	750,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	700,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	600,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	500,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	400,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	300,000	
4.2.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	900,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	800,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	700,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	600,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	500,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	400,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.3.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	1,100,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	900,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	850,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	800,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	700,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	600,000	
4.4.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	1,200,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	1,100,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	950,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	900,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	850,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	800,000	
4.5.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	2,000,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	1,750,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	1,400,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	1,300,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	1,200,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	1,100,000	
4.6.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 5 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	3,000,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	2,500,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	2,400,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	2,000,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	1,800,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	1,600,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	1,500,000	
4.7.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	700,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	600,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	500,000	
	d. KOORDINATOR		450,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	400,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	300,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	250,000	
4.8.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	800,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	650,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	600,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	550,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	500,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	400,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	300,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.9.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	950,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	750,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	700,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	650,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	600,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	550,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	350,000	
4.10.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	900,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	800,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	700,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	600,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	500,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	400,000	
4.11.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	1,400,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	1,300,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	1,200,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	1,100,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	1,050,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	1,000,000	
4.12.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 5 BULAN			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	2,000,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	1,800,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	1,700,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	1,600,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	1,300,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	1,200,000	
4.13.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN LINTAS SKPD			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	650,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	550,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	500,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	450,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	400,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	300,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	250,000	
4.14.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN LINTAS SKPD			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	750,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	600,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	550,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	500,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	450,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	400,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	300,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.15.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN LINTAS SKPD			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	900,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	800,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	750,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	700,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	650,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	600,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	500,000	
4.16.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN LINTAS SKPD			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	900,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	850,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	800,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	700,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	650,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	600,000	
4.17.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN LINTAS SKPD			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	1,200,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	950,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	900,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	800,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	750,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	700,000	
4.18.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 5 BULAN LINTAS SKPD			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	1,400,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	1,300,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	1,200,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	1,100,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	900,000	
4.19.	KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	850,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	800,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	750,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	650,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	550,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	450,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	400,000	
4.20.	KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	750,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	700,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	650,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	600,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	550,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	500,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	400,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.21.	KEGIATAN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN SURAT PENUGASAN KEPALA SKPD			
	a. PEMBINA	Orang/Kegiatan	700,000	
	b. PENGARAH	Orang/Kegiatan	650,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Kegiatan	600,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Kegiatan	550,000	
	e. KETUA	Orang/Kegiatan	500,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	450,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Kegiatan	400,000	
4.22.	KEGIATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PELAKSANAANNYA SELAMA 1 TAHUN			
	a. PEMBINA	Orang/Bulan	1,300,000	
	b. PENGARAH	Orang/Bulan	1,200,000	
	c. PENANGGUNGJAWAB	Orang/Bulan	1,000,000	
	d. KOORDINATOR	Orang/Bulan	950,000	
	e. KETUA	Orang/Bulan	900,000	
	f. SEKRETARIS	Orang/Bulan	850,000	
	g. ANGGOTA	Orang/Bulan	700,000	
5	HONORARIUM PELAKSANA PROGRAM APLIKASI KEUANGAN DAERAH			
	5.1. ADMINISTRATOR	Orang/Bulan	650,000	
	5.2. OPERATOR	Orang/Bulan	500,000	
6	NARA SUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN DIKLAT / SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI DILINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN BENGKAYANG			
	6.1. PEJABAT ESELON I	Orang/Jam	1,000,000	
	6.2. PEJABAT ESELON II	Orang/Jam	750,000	
	6.3. PEJABAT ESELON III KE BAWAH	Orang/Jam	600,000	
	6.4. MODERATOR	Orang/Jam	500,000	
	6.5. PAKAR / PRAKTISI / PEMBICARA KHUSUS / WIDYASWARA	Orang/Jam	1,000,000	
7	HONORARIUM INSTRUKTUR			
	7.1. INSTRUKTUR PNS	Orang/Jam	50,000	
	7.2. INSTRUKTUR NON PNS	Orang/Jam	Sesuai Pasar	
8	UANG MAKAN HARIAN PEGAWAI	Orang/Harian	15,000	
9	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	9.1. KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT PEJABAT / ESELON / SETARA			
	a. MAKAN	Orang/Kali	40,000	
	b. SNACK	Orang/Kali	15,000	
	9.2. KONSUMSI RAPAT BIASA			
	a. MAKAN	Orang/Kali	25,000	
	b. SNACK	Orang/Kali	10,000	
10	BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	10.1. LEMBUR DILUAR JAM KERJA			
	a. GOLONGAN IV	Orang/Jam	15,000	
	b. GOLONGAN III	Orang/Jam	12,500	
	c. GOLONGAN II	Orang/Jam	10,000	
	d. GOLONGAN I	Orang/Jam	8,000	
	10.2. LEMBUR DILUAR HARI KERJA			
	a. GOLONGAN IV	Orang/Jam	30,000	
	b. GOLONGAN III	Orang/Jam	25,000	
	c. GOLONGAN II	Orang/Jam	20,000	
	d. GOLONGAN I	Orang/Jam	16,000	
	10.3. UANG MAKAN LEMBUR	Orang/Harian Lembur	20,000	

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

**PENJELASAN**  
**LAMPIRAN STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN BENGKAYANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2010**

**1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing SKPD berdasarkan besaran pagu yang dikelola. Untuk Koordinator Pengelola Keuangan, BUD, Kuasa BUD, Pembantu BUD, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran, bendahara pembantu pengeluaran, bendahara penerimaan, Bendahara Pembantu bendahara pengeluaran, bendahara pembantu pengeluaran, bendahara penerimaan, Bendahara Pembantu Penerimaan, Pengurus Barang, dan Penyimpan Barang di berikan kepada satu orang maksimal 12 bulan.

**2 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**

**a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**

Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) maksimal 1 (satu) orang.

**b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa**

Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna barang / jasa menjadi panitia pengadaan barang / jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Anggota panitia pengadaan barang / jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

**Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang**

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menerima / memeriksa barang / jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang / jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

**a.** Honorarium diberikan kepada PNS yang berdasarkan surat keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Perhitungan APBD dan Pelaporan yang proses penyusunannya lebih dari 3 (tiga) bulan lintas SKPD pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

**b.** Honorarium diberikan kepada PNS yang berdasarkan surat keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan peraturan daerah yang proses penyusunannya 1 (satu) bulan lintas SKPD pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

**c.** Honorarium diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati / Kepala SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan tidak secara terus menerus maksimal 1 (satu) kali dalam kegiatan. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

**d.** Honorarium diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Penugasan Kepala SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim dalam perumusan kebijakan. Maksimal 1 (satu) kali dalam kegiatan.

**e.** Untuk kegiatan dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya satu tahun dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**5 Honorarium Pelaksana Program Sistem Aplikasi Komputer**

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas sebagai Administrator dan Operator Sistem Aplikasi Komputer pada SKPD yang menggunakan program Sistem Aplikasi komputer. Penunjukan PNS berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang.

**6 Honorarium Nara Sumber dalam rangka kegiatan Diklat / Seminar / Rakor / Sosialisasi**

Honorarium diberikan kepada narasumber untuk kegiatan Diklat / Sosialisasi / Seminar / Rakor yang diselenggarakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah narasumber dari PNS sesuai dengan tingkatan jabatannya sedangkan narasumber dari Non PNS sesuai dengan profesinya seperti Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus / dan Widyaswara

**7 Honorarium Instruktur**

Instruktur adalah PNS yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Untuk instruktur yang berasal dari non PNS, honorinya mengacu pada harga pasar dan / atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

**8 Satuan biaya Uang Makan Harian Pegawai**

Uang makan harian pegawai diberikan kepada PNS/CPNS dan Tenaga honorer dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam sebulan.

**9 Konsumsi Rapat**

Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat / pertemuan biasa yang diselenggarakan di kantor dengan peserta berasal dari unit kerja pada SKPD / lintas SKPD / Instansi / Wilayah.

Rapat koordinasi Pejabat/Eselon/Setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Pejabat/Eselon/Setara

**10 Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur**

a. Lembur diluar jam kerja minimal 3 (tiga) jam dalam sehari.

b. Lembur diluar hari kerja maksimal 2 (dua) hari dalam seminggu.

c. Uang makan lembur diperuntukan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur maksimal 1 (satu) kali per hari.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA